



Dewan Soroti Temuan BPK di Diknas

SINTANG--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, mempertanyakan adanya kelemahan sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan. Hal tersebut sesuai temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga rawan akan terjadinya kebocoran anggaran.

Menurut anggota Komisi III DPRD Sintang, Syahroni, sebelumnya dewan ingin membahas persoalan terkait temuan BPK yang menemukan adanya kelemahan sistem intern Dinas pendidikan Sintang terhadap penyusunan laporan penggunaan dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan dana APBD.

"Sebelumnya kami ingin mempertanyakan hal tersebut pada rapat kerja kemarin, namun kepala dinas pendidikan tidak hadir. Sebab, ini harus dipertanggungjawabkan Kepala Dinas (Kadis)," kata Syahroni.

Perinciannya, muncul dari temuan BPK yang menyatakan dana sebesar 12.766.535.720,00 belum tercatat dalam neraca Pemkab Sintang, sehingga nilai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2014 kurang saja.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai pengguna barang daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait aset dari dana BOS dan APBD.

Sementara itu kadikondisfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Sintang, Lukman Riberu sedang melakukan perjalanan ke Pontianak. Sekretaris Dinas Pendidikan Sintang, Affen, yang mengatakan,

◆ Ke Halaman 27 kolom 5



Dewan Soroti Temuan BPK di Diknas

Sambungan dari halaman 28

temuan BPK bukan bentuk kebocoran atau kelalaian dinas pendidikan dalam menginventarisir aset negara. "Seluruh sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan sekolah seperti membeli kertas, komputer, kapur dan lainnya, yang mana merupakan aset sekolah juga. Namun, barang tersebut belum terinventaris," kata dia.

Ia melanjutkan, persoalan disebabkan pihak sekolah

membeli barang yang berasal dari dana BOS, namun belum melaporkan kepada Dinas Pendidikan Sintang, sehingga sulit untuk menginventarisir barang tersebut. "Bukan kita tidak mau menginventarisir, tetapi kami keterbatasan tenaga, karena sekolah banyak, dan barangnya juga banyak," katanya. Terdapat beberapa sekolah yang sudah memberikan laporan belanjanya, yang jelas Dinas pendidikan hanya sebatas menginventarisir.

"Ini bukan berarti dananya hilang, namun belum terinventarisir saja," katanya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya akan menambah beberapa tenaga, dan mengimbau bahkan turun kelapangan untuk menyampaikan kepada sekolah agar menyerahkan laporan penggunaan barang dan jasanya. "Kita kemarin sudah minta waktu tiga bulan, namun belum di akomodir. Tetapi saya yakin akhir tahun sudah terselesaikan," kata dia. (*stm*)